

Kajian Maslahat Terhadap Penanganan Rapid Tes Pada Pembangkangan Masyarakat Urban

Ashadi L. Diab¹

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Islam (IAIN) Kendari, Indonesia

Email Correspondence: ldiab@iainkendari.ac.id

Abstrak

Melalui sosial media masyarakat menggalang kekuatan untuk menolak rapid test yang selain berimplikasi luas pada melemahnya usaha penanggulangan virus corona juga memperburuk citra institusi kesehatan dan kemampuan para medis di dalam mengatasi penularan dan penyembuhan pasien terinfeksi corona. Studi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik cuplikan (sampling). Objek kajian dalam studi ini yang dikemas dengan literature review. Penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama Gerakan Social Media Menolak Rapid Tes dianggap ampuh dan sangat efektif untuk menyebarkan berita dan mendapatkan informasi dari berbagai tempat dan waktu, terkait dengan hal tersebut masyarakat saling memprovokasi, mengirim pesan berantai, masifkan berita Hoaks. Kedua, Faktor Penolakan atas Rapid Tes dengan tetap menjalankan kegiatan-kegiatan yang berisiko, Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ditengah covid 19 masyarakat kota kendari menunjukkan beberapa model penolakan terhadap covid ini yakni; paham keagamaan, tradisi saling berkunjung kepada sanad keluarga, persoalan ekonomi. Ketiga, Pembangkangan tidak bersentuhan/mendekati Rumah sakit dokter dalam masa covid, Sejatinya setiap orang yang mengalami gangguan kesehatan maka yang paling pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah menghubungi tenaga kesehatan tetapi hal yang berbeda yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan masyarakat dikota kendari ketika mengalami sakit justru tidak ingin berurusan dengan tenaga medis dikarenakan ada traumatik terhadap pemberitaan oleh dampak korona. Masalah Mursalah merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia

Keywords	:	Covid, Social Media, Middle Class, Resistance
DOI	:	10.31332/kalosara.v3i1.7729
Received	:	3 Maret 2023
Accepted	:	4 April 2023
Published	:	30 September 2023
How to cite	:	L. Diab, Ashadi (2023), Kajian Maslahat Terhadap Penanganan Rapid Tes Pada Pembangkangan Masyarakat Urban, <i>Kalosara: Family Law Review</i> , Vol 5 No 1, 74-84

1. Pendahuluan

Social media telah disalahgunakan pada masa pandemi COVID-19 untuk menentang tindakan medis terhadap masyarakat. Melalui sosial media masyarakat menggalang kekuatan untuk menolak rapid test yang selain berimplikasi luas pada melemahnya usaha penanggulangan virus corona juga memperburuk citra institusi kesehatan dan kemampuan para medis di dalam mengatasi penularan dan penyembuhan pasien terinfeksi corona. Pada saat yang sama jumlah penularan terus meningkat menjadi 341 orang terkonfirmasi positif dari hari sebelumnya sebanyak 337 pertanggal 26 Juni di

seluruh wilayah Kendari Sultra, sementara kemampuan pengetesan kondisi kesehatan warga untuk mendeteksi status kesehatan warga baru mampu dijangkau beberapa orang saja dan hasilnya menunggu waktu sekitar satu minggu untuk hasil tes Swab (Sumber Ibrahim pasien tes Swab). Penolakan warga terjadi secara meluas di berbagai tempat, yang menurut CDSCVB, merupakan bagian dari dampak informasi dari social media yang mendapatkan berita yang tidak akurat terkait dengan covid 19 (CDSCVB, 2020).

Studi tentang tentang COVID-19 sejauh ini banyak berbicara tentang kesehatan dan penularan yang menjadi tragedi (BDHDHD, 2020; NDVGHDV, 2020, GEURH, 2020), atau evaluasi atas kinerja buruk pemerintah dalam penanggulangan wabah (VE VE, 2020; VEVEM, Almuttaqi, 2020; Setiati, 2020), dan juga studi-studi yang menghitung dampak ekonomi yang diakibatkan oleh adanya wabah sejak bulan Maret di Indonesia (VEGVE, 2020; VRFVJHR, 2020; RHRM, 2020), atau studi yang menganalisis akibat trauma psikologis yang dialami oleh masyarakat selama COVID-19 yang berujung pada tindakan kekerasan yang fatal (Abdullah, 2020). Peran media walaupun sudah ditunjukkan penting dalam studi di Wuhan dan beberapa negara (GVDGDG, 2020; EGVR, 2020), tetapi dalam konteks Indonesia masih sangat terbatas. Apalagi isu penyalahgunaan media yang berakibat buruk dan mengancam usaha-usaha pengembalian normalitas baik secara kesehatan maupun sosial.

Studi ini melengkapi kekurangan dari studi yang ada dengan memetakan secara dekat suatu kasus di wilayah Indonesia, yakni di Kota Kendari, di mana social media telah dimanfaatkan sebagai media provokasi di dalam penolakan kebijakan pemerintah dalam masa pandemi, khususnya penolakan atas tindakan-tindakan media yang dilakukan oleh pemerintah. Pengetahuan tentang penggunaan dan penyalahgunaan media penting artinya dalam melihat efek buruk media yang berakibat pada kesulitan usaha pemecahan masalah kesehatan yang mengancam jiwa manusia. Dengan kata lain, secara khusus berusaha menemukan motif tentang mengapa social media menjadi pilihan dalam masyarakat.

Maslahah Mursalah merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok (Dzaruriyyah) mereka. Oleh karena itu, maslāhah mursālāh merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat (Zaky al-Din Sya'ban 2001).

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa (1) Penolakan masyarakat terjadi disebabkan oleh penggunaan media social secara intens dan mengakibatkan kepanikan dan ketakutan masyarakat terhadap pandemi Covid-19 dan Rapid tes (2) Penggunaan social media terjadi atas alasan akses yang mudah dan terjangkau menjadi alat produksi berita yang cukup efektif dalam masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah mengkonsumsi konten yang ditawarkan (3) Perspektif masalah dan Efektivitas social media dalam menggerakkan masyarakat sangat ditentukan oleh fitur yang melekat di

dalamnya, untuk dijadikan media penolakan berbagai kebijakan dan peraturan terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

2. Metode

Rapid tes merupakan upaya yang digalakkan secara intens oleh pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, namun belakangan ini upaya tersebut mendapat respons dari masyarakat dengan berbagai bentuk pembangkangan dan penolakan. Oleh karena itu, penelitian ini mendeskripsikan tentang penolakan kelas menengah terhadap rapid tes di kota Kendari Sulawesi Tenggara. Penelitian ini memilih lokasi di Kendari Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan bahwa Kendari menjadi salah satu wilayah yang masyarakatnya banyak melakukan penolakan Rapid Tes.

Studi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan teknik cuplikan (sampling). Observasi dilakukan secara langsung di beberapa tempat di Kota Kendari, demikian pula wawancara dengan berbagai informan dilakukan untuk memperoleh keterangan sebagaimana yang dibutuhkan dalam studi ini. Sementara itu, studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data yang berupa dokumen dan literatur terkait dengan objek kajian dalam studi ini yang dikemas dengan literature review.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, koran baik cetak maupun digital. Data yang ada kemudian dianalisis. Dengan teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selain itu, data dirangkum dengan reduksi data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terkait studi ini kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat (yang bersifat naratif).

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam teori penolakan/pembangkangan hukum yang dikemukakan oleh Thoreau bahwa sikap penolakan terhadap hukum (Civil Disobedience) merupakan sebuah sikap yang dimiliki oleh masyarakat yang memutuskan untuk tidak mau tunduk terhadap suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa atau singkatnya menentang sebuah kebijakan publik. Sikap penolakan yang dimiliki oleh masyarakat ini, biasanya didasari oleh sebuah alasan-alasan logis mengenai penolakan atau ketidaksetujuan masyarakat terhadap suatu kebijakan (Thoreau & MacLeish, 2001).

Pada hal ini kaitannya dengan perintah vaksinasi covid 19 yang dilakukan secara massal dengan tujuan menghambat penularannya, melalui penegasan dalam Perpres dan Permenkes. Akan tetapi ketika melihat fakta yang timbul di lapangan banyak sekali masyarakat yang ramai-ramai menolak untuk melakukan pemberian vaksin ini, tentunya dengan berbagai alasannya seperti yang Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law) Yusuf Abdul Rahman ditemukan di sosial media mainstream seperti twitter. Penolakan-penolakan tersebut berasal dari keluhan-keluhan masyarakat yang mengkhawatirkan tentang efikasi

vaksin yang akan beredar di Indonesia hanya berkisar di angka 65%. Kondisi ini diperparah dengan adanya seruan dari salah seorang tokoh anggota parlemen dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyatakan bahwa lebih baik bayar denda daripada harus di vaksin.

Kegaduhan-kegaduhan inilah yang pada akhirnya menyebabkan sebuah kondisi dimana semua orang berada dalam kondisi yang ragu untuk melaksanakan vaksinasi massal. Dalam pendapat Thoreau setidaknya ada tiga kemungkinan yang melatarbelakangi timbulnya sebuah penolakan yang dilakukan oleh masyarakat (Thoreau & MacLeish, 2001). Pertama, ada sebuah kelompok masyarakat yang memiliki anggapan dan memiliki pilihan untuk tidak setuju tetapi tetap bungkam, serta mau mengekspresikan pernyataan pendapat ketidaksetujuannya, dikarenakan ketakutan akan mendapatkan stigma dan cap sosial di masyarakat terhadap ketidaksetujuannya itu. Kedua, ada sebuah kelompok yang tetap mematuhi hukum kemudian mereka dapat di muka umum, seperti yang kita dengar akhir-akhir ini itulah mereka. Ketiga, kelompok yang menolak untuk mematuhi hukum namun tetap menyembunyikan pendapat ketidaksetujuannya terhadap vaksinasi massal sehingga tidak diketahui oleh publik secara luas.

Pada dasarnya pertentangan terhadap sebuah kebijakan publik adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindari. Kebijakan publik merupakan sebuah produk politik yang dikeluarkan pemerintah dengan maksud dan tujuan untuk mengatur masyarakat supaya berlaku tertib dalam tatanan kehidupan (Widodo, 2021). Akan tetapi, dalam iklim negara demokrasi dikenal juga dengan aspirasi publik yang menitik beratkan agar sebuah sistem yang dijalankan memiliki dimensi hukum yang luwes dan relatif, sehingga tidak terjadi pemaksaan kehendak. Banyak pihak seperti yang diliput oleh media masa menyayangkan sikap pemerintah yang memaksakan kehendak untuk mewajibkan penyuntikan vaksin secara massal, padahal setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih di tatanan kehidupan yang demokratis. Menurut Jhon Raws civil Disobedience ini memiliki sebuah kewajiban yang lahir secara natural untuk menegakan sebuah keadilan dalam tatanan masyarakat.

Gerakan ini sebetulnya digunakan masyarakat sendiri untuk mencari sebuah keadilan dalam masyarakat (Julaiha, 2020). Ada hal yang seharusnya terjadi terhadap pertentangan antara penolakan dan keharusan mematuhi hukum dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini terletak pada objek hukumnya yakni mengoreksi untuk sebuah peraturan yang berlaku.

Hakikat dari Masalah Mursalah sebagai produk hukum Islam, sebagai berikut: Masalah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

A. Intensitas Penggunaan Media Sosial di Masa Pandemi Covid-19

Masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada teman-teman dan keluarganya dalam melakukan penolakan terhadap Rapid tes dengan menggunakan media berupa WA, telpon dan SMS, seperti yang disampaikan beberapa masyarakat dipasar bahwa, “kami saling memberikan informasi kepada rekan-rekan kami dan keluarga terkait adanya rencana rapid tes yang akan dilakukan oleh dinas yang ditunjuk oleh pemerintah dengan menggunakan media telepon dan WA kadang-kadang juga lewat SMS karena masih banyak kami disini belum menggunakan handphone android. (Wawancara Mama Pira 2021)

Keberadaan media sosial dengan berbagai fitur yang melekat di dalamnya dijadikan media penolakan berbagai kebijakan dan peraturan terkait pencegahan dan penanganan Covid-19. Masyarakat dalam menyampaikan informasi tersebut bisa sampai dua-tiga kali dalam sehari melalui fitur-fitur, sehingga ini bisa dikatakan sangat massif dan sering dalam mengirim pesan-pesan yang berisi ajakan untuk tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk rapid tes sebagai langkah memutus covid tersebut. (Wawancara bapak Reahan 2021)

Penggunaan social media sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi dan inspirasi selama masa pandemi Covid-19 dalam memprovokasi masyarakat atau teman-teman untuk melakukan rapid tes dilakukan oleh beberapa kelas menengah, seperti pegawai instansi pemerintah dan swasta serta pedagang yang ada dipasar, seperti yang disampaikan oleh pegawai pemerintahan bahwa, “ Kami intens menggunakan media social seperti memasukkan difacebook, WA tentang rencana pemerintah untuk melakukan rapid tes kepada kami, dan sepakat untuk tidak mengikutinya dan menghindari (wawancara Tenri 2021)

B. Gerakan Social Media Menolak Rapid Tes

Dunia online memang dianggap ampuh dan sangat efektif untuk menyebarkan berita dan mendapatkan informasi dari berbagai tempat dan waktu, terkait dengan hal tersebut masyarakat kota kendari dalam penolakannya terhadap rapid tes dilakukan dengan tiga metode yakni; saling memprovokasi, mengirim pesan berantai, masifkan berita Hoaks. Saling memprovokasi, Upaya pemerintah kota kendari dalam menekan penyebaran covid 19 dengan melakukan rapid tes dikantor, pasar dan tempat keramaian lainnya ternyata mendapat respon penolakan oleh beberapa masyarakat menengah hal ini dibuktikan dengan beberapa masyarakat yang saling memprovokasi terhadap dampak dari rapid tes tersebut, seperti hasil wawancara bahwa:

“Kami dikantor saling memprovokasi untuk tidak masuk kantor pada hari di lakukan rapid tes, (wawancara windi 2020), sama halnya ditempat keramaian seperti pasar para penjual banyak yang lari menghindari rapid tes bahkan berdebat dengan para petugas untuk melakukan tes tersebut. (wawancara Ode 2021)

Mengirim Pesan berantai, Dalam upaya masyarakat untuk tidak mengikuti anjuran pemerintah dengan memeriksakan diri dan keluarganya melalui rapid tes ternyata

dilakukan melalui pesan-pesan WA dan fasilitas media sosial lainnya yang dikirim digroup untuk tidak ikut dan menghindari pemeriksaan tersebut. Hal ini disampaikan oleh beberapa masyarakat bahwa,

”Kami melakukan pengiriman berita-berita ke teman-teman, keluarga dan group-group media lainnya untuk tidak ikut melakukan rapid tes karena pemberitaan dampak terhadap rapid tes tersebut. (wawancara Nahrida 2021)

Masifnya berita Hoaks. Penyebaran berita hoaks terkait rapid tes memicu kepanikan terhadap masyarakat yang dianjurkan oleh pemerintah, pada sisi lain anjuran pemerintah ingin ditaati untuk melakukan rapid tes sementara berita-berita negatif terkait dampak rapid tes tersebut semakin massif, hal ini disampaikan oleh responden bahwa, “ mestinya pemerintah sebelum turun kelapangan untuk melakukan rapid tes terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada kami masyarakat terhadap keistimewaan tes tersebut, sehingga masyarakat tidak menolak dan lari ketika ada petugas untuk melakukan rapid. Wawancara muslim 2020).

C. Pembangkangan tidak bersentuhan Rumah sakit dokter dalam masa covid

Tidak ingin berurusan dengan tenaga Medis. Sejatinya setiap orang yang mengalami gangguan kesehatan maka yang paling pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah menghubungi tenaga kesehatan tetapi hal yang berbeda yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan masyarakat dikota kendari ketika mengalami sakit justru tidak ingin berurusan dengan tenaga medis dikarenakan ada traumatik terhadap pemberitaan oleh dampak korona, seperti yang disampaikan responden bahwa,” lebih baik kami pergi keorang pintar (dukun) untuk melakukan pengobatan dari pada harus berurusan dengan tenaga kesehatan karena banyak kejadian-kejadian yang ada ditelevisi dan media lainnya yang terkena virus karena tenaga kesehatannya yang positif.

Menghindari Rumah sakit. Dalam kondisi merebaknya dampak yang sangat luar biasa terhadap virus korona mengakibatkan masyarakat yang terserang penyakit biasanya enggang memeriksakan penyakitnya dirumah sakit, alasan paling kuat adalah dirumah sakit banyak yang positif covid seperti yang disampaikan responden bahwa,

”Saya sangat takut untuk memeriksakan diri saya dan keluarga kerumah sakit ketika sakit, karena biasanya orang yang tidak terdampak virus korona setelah diperiksa atau masuk rumah sakit bisanya positif atau bahkan meninggal dunia keluar dari rumah sakit (wawancara Ibnu 2020),

Lebih lanjut disampaikan oleh responden bahwa: pemahaman terhadap masyarakat sangat perlu dilakukan dengan serius supaya mengetahui cara untuk mengantisipasi virus ini, karena banyak juga masyarakat yang tidak mau memeriksakan sejak dini terhadap kondisinya misalnya rapid tes karena pemahaman sebahagian masyarakat setelah dilakukan pemeriksaan rapid tes justru berpotensi positif. (Wawancara Maemuna 2021)

Menghubungi dokter keluarga/teman. Beberapa peristiwa yang terjadi di wilayah Indonesia bahkan di kota kendari yang mencari dokter kenalannya untuk konsultasi ketika ada keluhan penyakit pada dirinya terlebih pada saat sekarang ini, walaupun di rumah sakit pelayanannya 24 jam sehari semalam namun ada kurang kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit dan tenaga medik lainnya, hal ini disampaikan oleh beberapa responden bahwa, ”kami selama ada covid 19 kepercayaan terhadap dokter yang kami tidak kenal baik semakin bertambah dikarenakan ketidakpuasan terhadap pemeriksaan dan penjelasan terhadap penyakit yang kami konsultasikan, tapi kalau dokter yang ada hubungan keluarga atau kenalan baik maka kami merasa puas atas pemeriksaan dan penjelasannya.

D. Penolakan Rapid Tes dengan tetap menjalankan kegiatan-kegiatan yang berisiko

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ditengah covid 19 masyarakat kota kendari menunjukkan beberapa model penolakan terhadap covid ini yakni; a.paham keagamaan, b. tradisi saling berkunjung kepada sanad keluarga, c. persoalan ekonomi Paham keagamaan. Dalam menjalankan aktivitas keagamaan sebagian masyarakat ditengah masih meningkatnya penyebaran virus ini, berbagai macam alasan yang menguatkan keinginan masyarakat untuk selalu datang ketempat ibadah baik sebelum adanya pengumuman new normal maupun pada saat pelarangan yang sangat ketat oleh pemerintah setempat seperti yang dilakukan oleh pak Yasin bahwa;

“Dalam menghadapi penyakit yang saat ini menjakiti seluruh dunia, bukan berarti kita harus mengosongkan mesjid (tidak kemesjid), disinilah ujian Allah SWT yang harus kita buktikan rasa cinta kepadanya. Apapun yang terjadi kepada diri kita semestinya perintahnya tidak boleh terabaikan gara-gara virus tersebut, tuhan yang memberikan penyakit niscaya tuhan juga yang akan memberikan kesembuhan” (Wawancara Yasin 2020)

Begitu pula yang disampaikan oleh responden bahwa;

“Apalagi pada saat ini dengan adanya new normal majelis- majelis taklim sudah diberikan kesempatan untuk dibuka lagi seperti biasanya, hal ini disampaikan oleh ustad Rusnam bahwa” setelah adanya new normal pengurus majelis taklim di beberapa tempat sudah mengundang saya untuk mengisi acara ceramah dimesjidnya” (Wawancara Ust Rusnam 2021)

Tradisi saling berkunjung terhadap Kerabat. Bagi sebagian masyarakat yang ada di kota kendari menjalin silaturahmi antara sesama merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat di sukai oleh Allah SWT, apalagi berkunjung kepada sanad keluarga kita yang sudah lama tidak berjumpa. Tradisi ini bukan hanya pada hari lebaran akan tetapi sebelum masuk ramadhanpun mereka lakukan seperti yang dilakukan oleh beberapa keluarga baik sebelum maupun setelah lebaran,

“kami tau bahwa ada virus korona, akan tetapi ini merupakan tradisi kami sebelum dan sesudah lebaran kami menganggap wajib untuk saling mengunjungi, apalagi keluarga dekat kami seperti Ayah/Ibu saudara-saudara kami. (Wawancara Waode 2021).

Merawat dan melanggengkan tradisi saling mengunjungi keluarga merupakan kepercayaan bagi masyarakat untuk kemurahan reski pada keluarganya, sehingga kalau itu bisa ditempu dengan kendaraan atau jalan kaki mereka akan mengupayakan walaupun dimungkinkan untuk saling menyapa lewat telepon seperti yang disampaikan oleh salah seorang bahwa

”Saat ini pemerintah menganjurkan untuk menyapa keluarga lewat telepon atau faslitas online namun kami tetap berkeyakinan bahwa itu mengurangi keberkahan silaturahmi”.(Wawancara P. Saman 2021)

Tekanan Ekonomi. Dampak terhadap ekonomi akibat virus korona melanda semua wilayah diseluruh dunia tidak terkecuali kota kendari Sulawesi tenggara, berbagai macam model yang ditunjukkan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonominya supaya tetap berjalan dan menghasilkan, seperti yang disampaikan oleh penjual ikan keliling, tukang ojek, penjual balon bahwa,

“Kami sebetulnya tidak akan keluar menjual seperti ini jika larangan pemerintah untuk tidak meninggalkan rumah dibarengi dengan jaminan langsung tunai, tapi pada kenyataannya sampai saat ini kami belum terima apapun, walaupun ditempat lain sudah ada yang menerima batuan tersebut”.(Wawancara Nyoman, Ibel, Ode 2021).

E. Penolakan Rapid Tes melalui Media Sosial dalam Masalah

Media sosial memiliki pengaruh dan dampak signifikan dalam menghalangi upaya pemerintah dalam percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19 di Indonesia khususnya dikendari. Dengan melalui media sangat berdampak terhadap pembangkangan sosial yang dilakukan oleh masyarakat karena hanya membaca dan mengetahui lewat media berupa pesan berantai tentang implikasi rapid tes, sehingga terekam dalam ingatannya bahwa,” kalau melakukan rapid tes justru berpeluang untuk berdampak positif, apalagi kalau ada gejala flu sedikit pasti sudah positif, selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa,

“Kami protes untuk melakukan rapid tes karean hingga saat ini tidak ada satupun kasus positif korona dilingkungan kami, meski demikian kita tetap saling mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan mengikuti protokol. (wawancara Qadar 2021)

Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah untuk tidak mengikuti rapid tes yang ditawarkan oleh pemerintah berdampak kepada kebijakan oleh pemerintah untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang membangkan untuk tidak melakukan rapid tes, terutama kepada pegawai-pegawai pemerintah dan swasta, hal ini berdasarkan penyampaian pemprov pada saat melaku rapat bersama SKP, berdasarkan

yang disampaikan peserta rapat bahwa “ gubernur akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang menolak melakukan rapid tes. (Wawancara mutakim 2021)

Maslahah Mursalah merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok (Dzaruriyyah) mereka. Oleh karena itu, Zaky al-Din Sya’ban menyebutkan bahwa maslāhah mursālah merupakan salah satu dasar tasyri’ yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat.

Maslāhah mursālah itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum- hukum yang ada penguatnya melalui suatu i’tibār. Juga difokuskan pada hal- hal yang tidak didapatkan adanya ijma’ atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Dan mengikuti anjuran dari pemerintah terkait dengan patuh terhadap penyakit covid berarti turut serta dalam memelihara diri dan jiwa kita dengan mengikuti anjuran pemerintah dan ini sejalan dengan maslahat dalam hukum islam..

4. Kesimpulan

Anjuran terhadap upaya vaksinasi covid 19 yang dilakukan secara massal oleh pemerintah Republik Indonesia merupakan sebuah Langkah positif dalam menekan angka pertumbuhan pandemik covid 19. Melalui perpres No 99 tahun 2020 dan Permenkes 84 tahun 2020 sudah menjadi guide yang bisa dijadikan acuan bagi masyarakat untuk patuh terhadap pelaksanaan vaksinasi secara massal ini, karena memiliki nilai manfaat yang akan membawa masyarakat terbebas dari wabah ini dengan meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara herd immunity. Kepatuhan hukum ini atau obedience law, dalam pandangan filsafat hukum ini merupakan pilihan yang dapat diambil masyarakat dalam merespon kebijakan hukum yang lahir. Adanya anjuran vaksinasi ini, merupakan sebuah langkah mitigasi yang saya sepakati untuk dilakukan oleh pemerintah walaupun penolakan (disobedience law) dari kelompok masyarakat akan tetap. Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum.

Maslahah Mursalah merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, maslāhah mursālah merupakan salah satu dasar tasyri’ yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat.

Keterbatasan dari kajian ini salah satunya adalah belum teransparan masyarakat terkait dengan peristiwa-pristiwa yang dialami dalam lingkungannya karena ada ketakutan yang muncul dari dalam dirinya atas sanksi yang diterapkan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- A.B., K., & S.R., A. (2020). Social media panic and COVID-19 in India. *Journal of Travel Medicine*. <https://doi.org/10.1093/jtm/taaa057> LK - https://hollis.harvard.edu/openurl/01HVD/HVD_URL?sid=EMBASE&sid=EMBASE&issn=17088305&id=doi:10.1093%2Fjtm%2Ftaaa057&atitle=Social+media+panic+and+COVID-19+in+India&stitle=J+Travel+Med&title=Journal+of+travel+medicine&volume=&issue=&spage=&epage=&aulast=Kadam&aufirst=Abhay+B.&auinit=A.B.&aufull=Kadam+A.B.&coden=&isbn=&pages=-&date=2020&auinit1=A&auinitm=B
- Abdullah, I. (2020). COVID-19: Threat and fear in Indonesia. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*. <https://doi.org/10.1037/tra0000878>
- Ahmad, A. R., & Murad, H. R. (2020). The Impact of Social Media on Panic During the COVID-19 Pandemic in Iraqi Kurdistan: Online Questionnaire Study. *Journal of Medical Internet Research*, 22(5), e19556. <https://doi.org/10.2196/19556>
- Ahmad, A. R., Murad, H. R., & Gardner, M. R. (2020). The Impact of Social Media on Hyped Panic during the COVID-19 Pandemic â€™ The Iraq Case â€™ Table of Contents. *Journal of Medical Internet Research*. <https://doi.org/10.2196/preprints.19556>
- Gottlieb, M., & Dyer, S. (2020). Information and Disinformation: Social Media in the COVID-19 Crisis. *Academic Emergency Medicine*. <https://doi.org/10.1111/acem.14036>
- Lima, D. L., Lopes, M. A. A. A. d. M., & Brito, A. M. (2020). Social media: friend or foe in the COVID-19 pandemic? *Clinics (Sao Paulo, Brazil)*, 75, e1953. <https://doi.org/10.6061/clinics/2020/e1953>
- Massaad, E., & Cherfan, P. (2020). Social Media Data Analytics on Telehealth During the COVID-19 Pandemic. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.7838>
- Mohamad, S. M. (2020). Creative Production of “COVID-19 Social Distancing” Narratives on Social Media. *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*. <https://doi.org/10.1111/tesg.12430>
- Mulrennan, S., & Colt, H. (2020). Medical information and social media in the time of COVID-19. In *Respirology* (Vol. 25, Issue 6, pp. 578–579). <https://doi.org/10.1111/resp.13832>
- Reynolds, W. N., Weber, M. S., Farber, R. M., Corley, C., Cowell, A. J., & Gregory, M. (2010). *Social media and social reality*. 221–226. <https://doi.org/10.1109/isi.2010.5484733>
- Sampurno, M. B. T., Kusumandyoko, T. C., & Islam, M. A. (2020). Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15210>
- Tasnim, S., Hossain, M. M., & Mazumder, H. (2020). Impact of Rumors and Misinformation on COVID-19 in Social Media. *Journal of Preventive Medicine and Public Health = Yebang Uihakhoe Chi*, 53(3), 171–174.

<https://doi.org/10.3961/jpmpm.20.094>

Wajahat Hussain. (2020). Role of Social Media in COVID-19 Pandemic. *The International Journal of Frontier Sciences*, 4(2).
<https://doi.org/10.37978/tijfs.v4i2.144>

Yates, S., & Lockley, E. (2018). Social Media and Social Class. *American Behavioral Scientist*, 62(9), 1291–1316. <https://doi.org/10.1177/0002764218773821>

Zhao, Y., & Xu, H. (2020). Chinese Public Attention to COVID-19 Epidemic: Based on Social Media. In *medRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2020.03.18.20038026>